

## Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transpransi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Lutfia Putri Salsabila<sup>1</sup>, Sonny Fransisco Siboro<sup>2</sup>, Irna Susilawati<sup>3</sup>, Indriyani Diwantari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bina Sarana Informatika

Alamat: Jl. Margonda No.8, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Korespondensi penulis: [lutfiaputrisalsabila03@gmail.com](mailto:lutfiaputrisalsabila03@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *The implementation of the regional financial accounting system is important in realizing the financial transparency and accountability of the West Java provincial government. With a structured and measurable accounting system, financial information can be presented in a clear and timely manner to stakeholders. The West Java provincial government has taken strategic steps in strengthening its financial accounting system, including the implementation of relevant accounting standards and the use of information technology to accelerate the financial reporting process. Transparency in the accounting system allows the public to easily access financial information and understand the use of public funds. This builds public trust in government, as well as facilitates effective oversight of public financial management. Accountability is also strengthened through a good accounting system, as it allows for clear tracking of the flow of funds and accountability for their use. However, challenges remain in optimally implementing the regional financial accounting system. A strong commitment from the West Java provincial government is needed to continuously improve financial transparency and accountability, as well as to ensure that the existing accounting system runs efficiently and effectively. Thus, the implementation of the regional financial accounting system will continue to be a focus in efforts to improve public financial governance in West Java province.*

**Keywords:** *Regional Financial Accounting System, Financial Transparency, Government Accountability*

**Abstrak.** Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam terwujudnya keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat yang transparan dan berakuntabilitas. Dengan adanya sistem akuntansi yang terstruktur dan terukur, tepat waktunya informasi yang tersaji dengan jelas dan kepada pemangku kepentingan. Dilakukannya langkah-langkah yang strategis oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dalam memperkuat sistem akuntansi keuangannya, termasuk implementasi standar akuntansi yang relevan dan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelaporan keuangan. Transparansi dalam sistem akuntansi memungkinkan publik untuk mengakses informasi keuangan dengan mudah dan memahami penggunaan dana publik. Ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memfasilitasi pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas juga diperkuat melalui sistem akuntansi yang baik, karena memungkinkan untuk pelacakan yang jelas terhadap aliran dana dan pertanggungjawaban penggunaannya. Namun, tantangan masih ada dalam mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal. Pemerintah provinsi Jawa Barat perlu berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta memastikan bahwa sistem akuntansi yang ada berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan terus menjadi fokus dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan publik di provinsi Jawa Barat.

**Kata kunci:** Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Keuangan, Akuntabilitas Pemerintah

### LATAR BELAKANG

Diterapkannya suatu sistem akuntansi keuangan daerah telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, terutama di Provinsi Jawa Barat, dalam usaha terwujudnya tata kelola keuangan publik yang berakuntabilitas dan transparan. Seiring dengan tuntutan akan baiknya tata kelola dan pertanggungjawaban yang lebih tinggi, sistem akuntansi keuangan daerah

menjadi fondasi penting untuk terjaganya integritas serta percayanya masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu entitas pemerintahan terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan publik yang efisien dan efektif. Untuk mencapai hal ini, implementasi sistem akuntansi keuangan daerah menjadi landasan yang krusial. Dengan sistem yang terstruktur dan terukur, pemerintah provinsi mampu memberikan hasil informasi keuangan secara relevan dan akurat, yang nantinya transparansi dan akuntabilitasnya akan meningkat.

Transparansi keuangan merupakan prinsip yang mendasari baiknya pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat mempunyai informasi informasi keuangan pemerintah yang dapat diakses dengan lebih baik lagi, sehingga dapat memantau penggunaan dana publik secara lebih efektif. Ini juga memungkinkan adanya kontrol sosial yang lebih baik terhadap kebijakan pengeluaran dan investasi pemerintah, serta membangun kepercayaan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, akuntabilitas pemerintah juga menjadi tujuan utama dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan sistem yang baik, pemerintah provinsi dapat melakukan pelacakan yang jelas terhadap aliran dana publik, mulai dari sumber pendapatan hingga penggunaannya. Hal ini memungkinkan adanya pertanggungjawaban yang lebih baik atas setiap keputusan keuangan yang diambil, serta memfasilitasi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan publik.

Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat, tantangan dan hambatan masih ada. Semua pihak terkait perlu berkomitmen kuat, meliputi pemerintah, lembaga audit, serta masyarakat, untuk terus memperkuat sistem ini. Dengan demikian, pendahuluan ini menjadi landasan penting dalam memahami pentingnya sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan untuk terwujudnya keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berakuntabilitas dan transparan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat**

Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat berdampak signifikan pada tingkat transparansi dalam penyajian informasi keuangan pemerintah kepada publik. Transparansi dalam konteks ini mengacu pada jelasnya, akuratnya, serta mudahnya akses informasi yang tersedia mengenai pengelolaan keuangan publik, yang dapat dipahami dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan. Dengan adanya sistem yang terorganisir

dengan baik, data keuangan dari berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran dapat diolah secara sistematis, sehingga memungkinkan untuk penyusunan laporan keuangan yang komprehensif dan transparan. Misalnya, sistem akuntansi yang mencatat setiap transaksi keuangan secara rinci akan memudahkan penyusunan laporan arus kasnya, neracanya, dan laba ruginya yang menggambarkan keseluruhan kondisi keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga memungkinkan adanya standar yang lebih konsisten pada penyediaan informasi keuangan melalui standar akuntansi yang berlaku, seperti *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) atau Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadi lebih mudah dipahami dan dibandingkan dengan entitas lain, baik di tingkat regional maupun nasional. Ini berkontribusi pada peningkatan transparansi karena memudahkan pemangku kepentingan untuk melakukan analisis komparatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. (Jubaedah, 2011)

### **Akuntansi Sektor Publik**

Pengertian menurut Mahmudi (2016:19). di kutip dari (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) pemerintah sebagai agen yang wajib atas pengelolaan, pelaporan, pengungkapan seluruh kegiatan yang kaitannya pada sumber daya publik yang digunakan kepada *principal* (pemberi manfaat). Dengan demikian, akuntabilitas sektor publik memainkan peran penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah karena tujuan penyelenggaraannya adalah untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat umum atas penggunaan sumber daya publik.

Akuntansi Sektor Publik merupakan entitas dengan sumber daya ekonomi yang besar yang tidak sama pada entitas ekonomi lainnya, terutama perusahaan dengan *profit oriented*, karena pengelolaannya bukan untuk mencari profit (nirlaba). (bidin A, 2017)

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah, APBD baik dari menyusun rancangannya, menetapkannya, melaksanakan dan menatausahakannya, pelaporan realisasinya, akuntansinya dan melaporkan keuangan pemerintah daerah, menyusun rancangan pertanggung jawabannya, kekayaan daerah dan utang daerahnya, informasi keuangan daerah, sampai membina dan mengawasi tata kelola keuangan daerahnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Keuangan & Nomor, 2023)

### **Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Laporan pertanggungjawaban pada periode pemerintahan dan akhir tahun anggaran harus disampaikan kepala kepada DPRD sebagai perwakilan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya daerah. Dalam hal ini pertanggungjawaban tersebut disampaikan

dalam bentuk rancangan perda yang laoran keuangannya telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK maksimal 6 bulan sejak tahun anggarannya berakhir, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa laporan keuangan ini mencakup Laporan Aliran kas, Laporan Keuangan APBD, Pencatatan Laporan Keuangan BUMD, dan Neraca (Jawab et al., 2006) ada pada halaman ke 29, jurnal ke 5

## **METODE PENELITIAN**

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat, terutama dalam hal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Langkah pertama dalam studi ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, dan artikel terkait yang diterbitkan baik oleh lembaga akademik maupun lembaga pemerintah terkait.

Selanjutnya, setelah sumber-sumber relevan diidentifikasi, dilakukan proses seleksi yang cermat untuk memilih informasi yang paling relevan dan terkini. Fokus utama penelusuran literatur adalah pada studi-studi empiris, panduan praktis, serta kebijakan dan regulasi terkait menerapkan secara general sistem akuntansi keuangan daerahnya di Indonesia serta yang terkhusus pada Provinsi Jawa Barat.

Analisis terhadap literatur dilakukan dengan pendekatan kritis dan komprehensif. Informasi yang ditemukan dari berbagai sumber dievaluasi untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat mempengaruhi keuangan pemerintah yang transparan dan berakuntabilitas, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, perbandingan antara berbagai pendekatan dan praktik terkait menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang juga bertujuan agar dapat diidentifikasikannya faktor-faktor yang berpengaruh pada berhasilnya implementasi di tingkat provinsi.

Selama proses analisis, penekanan diberikan pada temuan-temuan kunci, tren, tantangan, dan peluang yang terkait diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah yang secara spesifik pada Provinsi Jawa Barat. Informasi yang diperoleh dari studi pustaka ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi dan saran bagi pemerintah provinsi, lembaga akademik, dan pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Barat yang transparan dan berakuntabilitas melalui sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan secara efektif dan efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Geografis Provinsi

Satu di antara provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Barat, yang pusat pemerintahannya berlokasi di kota Bandung. Provinsi ini memiliki perbatasan di sebelah barat (Provinsi Banten & DKI Jakarta) Wilayah, di utara (Laut Jawa), di Timur (Provinsi Jawa Tengah), dan di Selatan (Samudera Hindia).

### Wilayah Administrasi

Luas Provinsi Jawa Barat adalah 35.377,76 Km<sup>2</sup>, yang dibagi atas 27 daerah kabupaten/kota diantaranya.

**Tabel 1. Kabupaten/Kota Beserta Luas Wilayah**

No	Nama Kabupaten / Kota	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Bogor	2 710,62
2	Sukabumi	4 145,70
3	Cianjur	3 840,16
4	Bandung	1 767,96
5	Garut	3 074,07
6	Tasikmalaya	2 551,19
7	Ciamis	1 414,71
8	Kuningan	1 110,56
9	Cirebon	984,52
10	Majalengka	1 204,24
11	Sumedang	1 518,33
12	Indramayu	2 040,11
13	Subang	1 893,95
14	Purwakarta	825,74
15	Karawang	1 652,20
16	Bekasi	1 224,88
17	Bandung Barat	1 305,77
18	Pangandaran	1 010,00
19	Kota Bogor	118,5
20	Kota Sukabumi	48,25
21	Kota Bandung	167,67
22	Kota Cirebon	37,36
23	Kota Bekasi	206,61
24	Kota Depok	200,29
25	Kota Cimahi	39,27
26	Kota Tasikmalaya	171,61
27	Kota Banjar	113,49
28	Provinsi Jawa Barat	35 377,76

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/indicato> 1

No	Entitas Pemda	Opini					
		TA 2020		TA 2021		TA 2022	
1	Provinsi Jawa Barat	WTP	tetap	WTP	tetap	WTP	tetap
	Kab. Bandung	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
4	Kab. Bandung Barat	WDP	naik	WTP	naik	WTP	tetap
	Kab. Bekasi	WTP	naik	WTP	tetap	WDP	turun
5	Kab. Bogor	WTP	naik	WDP	turun	WDP	tetap
6	Kab. Ciamis	WTP	Baik	WTP	tetap	WTP	tetap
7	Kab. Cianjur	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
8	Kab. Cirebon	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
9	Kab. Garut	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
10	Kab. Indramayu	WDP	naik	WTP	naik	WTP	tetap
11	Kab. Karawang	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
12	Kab. Kuningan	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
13	Kab. Majalengka	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
14	Kab. Pangandaran	WTP	naik	WTP	tetap	WDP	turun
15	Kab. Purwakarta	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
16	Kab. Subang	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
17	Kab. Sukabumi	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
18	Kab. Sumedang	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
20	Kota Bandung	WTP	naik	WTP	tetap	WDP	turun
21	Kota Banjar	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
22	Kota Bekasi	WTP	naik	WDP	turun	WDP	tetap
23	Kota Bogor	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
24	Kota Cimahi	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
25	Kota Cirebon	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
26	Kota Depok	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
27	Kota Sukabumi	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap
28	Kota Tasikmalaya	WTP	naik	WTP	tetap	WTP	tetap

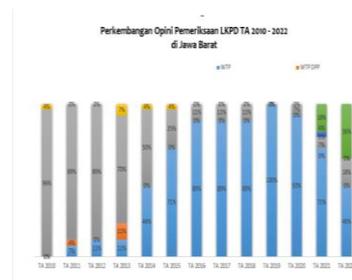
Sumber : <https://jabar.bpk.go.id/penyera> 1

**Gambar 1. Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Perpemda di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022**

Keterangan:

WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memeberikan Pendapat; dan TW: Tanpa Wajar.

Dilihat dari situasi dan kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) selama tahun 2021, terdapat tiga Pemda yang mengalami penurunan opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Ketiga pemda tersebut Opini LKPD Kabupaten Bekasi berubah dari WTP, Kabupaten Pangandaran juga mengalami penurunan dari WTP menjadi WDP dan Kota Bandung sebelumnya memiliki opini WTP berubah menjadi WDP. Sementara itu, untuk 25 Pemda lainnya. Opini LKPD-nya tetap sama seperti sebelumnya, yang memperlihatkan adanya pertahanan kualitas laporan keuangan pada sebagian besar pemdanya.



Sumber : <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkp> 1

**Gambar 2. Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022**



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Prosedur dan sistem keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dipatuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, mengikuti Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan Pemendagri No 64 Tahun 2013, menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan untuk mempercepat dan memperjelas akses terhadap laporan dan data keuangan dengan menerapkan perangkat lunak (*softwer*). Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dianggap efektif ketika anggaran berlebihan. Sistem akuntansi keuangan provinsi tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan provinsi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Asmoro, K. W., & Seltianingsih, A. N. (2019). Buku akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan good governance. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Bidin, A. (2017). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность». Вестник Росздравнадзора, 4(1).
- Jawab, P., Umum, P., Reldaksi, P., Reldaksi, A., ELng, M., & ELng, M. (2006). Pelngellolaan keluannngann daelrah. 4(52).
- Jubaeldah, E. L. (2011). ImplelmeIntasi kelbijakan transparansi keuangan di daelrah. Jurnal Ilmu Administrasi, VIII(34), 288–299.
- Keluangan, P., & Nomor, U. (2023). Salina, N.1. Oxford English Dictionary. <https://doi.org/10.1093/oeld/9600622025>
- Kusnadi, W. (2019). Buku ensiklopedia Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sleman: Pustaka Referensi.
- Nelgelri, P. M. D. (2013). Pelraturan melntelri dalam nelgelri relpublik Indonelsia No 64 tahun 2013 telntang pelnelrapan standar akuntansi pelmelrintahan belrbasis akrual pada pelmelrintah daelrah. Kelbijakan Akuntansi, 2013, 1–8.
- Suparyanto, & Rosad. (2020). Akuntabilitas & transparansi keuangan delse. In Suparyanto dan Rosad (2015) (Vol. 5, Nomor 3).